

Evolusi Ekonomi Bahrain: Perjalanan dari Era Minyak ke Diversifikasi Sektor

Riadhotul Muamalah

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 682, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

* Corresponding author: riyadhotulmuamala08@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara kepulauan dengan cadangan minyak terbatas, Bahrain menghadapi kerentanan struktural yang berakar pada ketergantungan historisnya pada sektor hidrokarbon. Studi ini menganalisis strategi diversifikasi ekonomi Bahrain yang berfokus pada keuangan, pariwisata, teknologi informasi, dan UKM melalui pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka teoritis Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE). Studi ini mengevaluasi bagaimana reformasi kelembagaan, seperti Visi Ekonomi Bahrain 2030 dan kotak pasir regulasi, serta insentif fiskal (PPN dan pajak perusahaan), telah mendorong transformasi struktural. Kontribusi sektor non-minyak terhadap PDB telah meningkat dari 50% pada tahun 2000 menjadi lebih dari 80% pada tahun 2023. Keberhasilan utama meliputi pertumbuhan keuangan Islam (16–18% dari PDB) dan perluasan UKM (30% dari PDB), yang didukung oleh kebijakan kepemilikan asing penuh dan program pelatihan Tamkeen. Sektor-sektor ini telah menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan stabilitas makroekonomi dan mendorong ekosistem yang didorong oleh inovasi. Namun demikian, tantangan yang terus berlanjut seperti ketergantungan pada tenaga kerja asing (70% dari angkatan kerja), persaingan regional dengan Dubai dan Arab Saudi, serta keterbatasan lahan (786,5 km²) menuntut solusi yang adaptif. Secara teoritis, studi ini menerapkan konsep ketergantungan jalur (path dependency) Douglass North dan teori biaya transaksi Oliver Williamson untuk memahami transisi kelembagaan di negara-negara Teluk yang bergantung pada rente. Secara praktis, studi ini menawarkan wawasan bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berpenghasilan menengah dengan keterbatasan sumber daya yang berupaya diversifikasi jangka panjang. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi regulasi, pengembangan sumber daya manusia, dan insentif investasi yang terarah untuk mencapai transformasi ekonomi pasca-minyak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Bahrain, Ekonomi, Diversifikasi

Pendahuluan

Bahrain adalah negara kepulauan kecil yang terletak di Teluk Persia, kawasan strategis di Timur Tengah. Negara ini terdiri dari 33 pulau dengan luas total sekitar 786,5 km² dan garis pantai sepanjang 161 km, menjadikannya salah satu negara maritim terkecil di dunia (Aljenaid et al., 2022). Sejarah Bahrain mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya besar, termasuk peradaban Dilmun, Persia, dan Islam. Setelah masa penjajahan Portugis dan Persia, Dinasti Al-Khalifa mengambil alih kekuasaan pada tahun 1783 dan memerintah hingga kini sebagai monarki konstitusional. Bahrain menjadi

protektorat Inggris pada akhir abad ke-19 dan akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada 15 Agustus 1971 (Jones, 2020).

Keluarga Al-Khalifa mengambil alih kekuasaan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1783, dan terus berkuasa hingga saat ini. Pada akhir abad ke-19, Inggris menjadikan Bahrain sebagai protektorat. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Bahrain memperoleh kemerdekaannya dari Inggris setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruhnya (Mukoyama, 2023). Sejak 1783, keluarga Al-Khalifa telah memerintah Bahrain sebagai monarki konstitusional. Setelah ayahnya, Emir Isa bin Salman Al Khalifa, wafat pada tahun 1999, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa naik takhta sebagai kepala negara. Pada tahun 2002, Bahrain berubah dari emirat menjadi kerajaan, dan Hamad bin Isa Al Khalifa mengubah gelarnya dari Emir menjadi Raja. Dinar Bahrain, mata uang resmi Bahrain, merupakan salah satu mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia dengan kisaran 2,65 dolar AS. Sejak ditemukannya minyak di Teluk Persia pada tahun 1932, Bahrain menjadi negara pertama yang menemukan ladang minyak di Teluk Persia (Harding et al., 2020).

Ladang minyak ini mampu memproduksi sekitar 50.000 barel per hari, yang setara dengan sekitar 80% pendapatan nasional negara tersebut. Namun, kesadaran akan keterbatasan cadangan minyak mendorong Bahrain untuk mengadopsi strategi diversifikasi ekonomi yang berorientasi masa depan (Matallah, 2020). Perkembangan sektor keuangan telah menjadikan negara ini pusat perbankan dan keuangan terkemuka di Timur Tengah. Contoh nyata ekspansi sektor keuangan Bahrain adalah pendirian Bahrain Financial Harbour (BFH), yang menjadi contoh utama upaya kelembagaan negara tersebut untuk menerapkan diversifikasi ekonomi melalui infrastruktur strategis. Terletak di jantung kota Manama, BFH dirancang untuk memposisikan Bahrain sebagai pusat regional untuk layanan keuangan dan investasi internasional. BFH menyediakan ruang kantor berkualitas tinggi, fasilitas keuangan terpadu, dan kerangka regulasi yang efisien untuk menarik lembaga perbankan multinasional, perusahaan rintisan fintech, dan usaha keuangan Islam (AlShehabi & Suroor, 2016).

Pengembangan BFH mencerminkan strategi Bahrain untuk menggabungkan infrastruktur fisik dengan reformasi hukum dan ekonomi guna meningkatkan daya saingnya. Sebagai pusat khusus dalam keuangan Islam dan regulasi fintech yang sedang berkembang, BFH memungkinkan Bahrain untuk membedakan diri dari pesaing regional yang lebih besar seperti Dubai dan Riyadh. Integrasinya dengan kebijakan nasional yang lebih luas seperti kotak pasir regulasi dan insentif kepemilikan asing penuh semakin menunjukkan bagaimana Bahrain menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan pelaksanaan praktis. Dengan demikian, BFH tidak hanya berdiri sebagai aset fisik tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mewujudkan aspirasi Bahrain untuk ketahanan ekonomi pasca-minyak. Industri aluminium, khususnya melalui perusahaan Aluminium Bahrain (Alba), telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, menempatkan Bahrain sebagai salah satu produsen aluminium terbesar di dunia di luar Tiongkok (Rahman & Zayed, 2021).

Diversifikasi ini menunjukkan komitmen Bahrain untuk mencapai ketahanan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya diversifikasi ekonomi Bahrain ditandai dengan investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur dan sektor non-hidrokarbon (Nakibullah, 2018). Pengembangan sektor pariwisata, yang difasilitasi oleh

peningkatan konektivitas regional, termasuk pembangunan jembatan penghubung ke negara-negara tetangga, bertujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pendapatan negara. Bersamaan dengan itu, upaya untuk menarik perusahaan teknologi dan perusahaan rintisan melalui penyediaan lingkungan bisnis yang kondusif dan regulasi yang mendukung inovasi, hal ini mencerminkan komitmen Bahrain untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Strategi ini secara keseluruhan menunjukkan perencanaan ekonomi yang berwawasan ke depan, yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketahanan ekonomi jangka panjang di tengah lanskap global yang terus berubah ([Chen et al., 2022](#)). Investasi ini juga sejalan dengan upaya regional untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas.

Menghadapi tantangan ekonomi global dan keterbatasan sumber daya minyak, Bahrain telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendiversifikasi perekonomiannya. Urgensi untuk mengkaji diversifikasi ekonomi Bahrain terletak pada titik kritis negara tersebut di tengah transisi energi global, persaingan ekonomi regional, dan keterbatasan sumber daya struktural ([Nassar, 2024](#)). Seiring dunia beralih ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, negara-negara rente seperti Bahrain menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang di luar pendapatan minyak. Sementara itu, negara-negara tetangga Teluk seperti Arab Saudi dan UEA secara agresif menerapkan kebijakan diversifikasi, yang meningkatkan taruhan bagi daya saing dan posisi Bahrain di kawasan tersebut. Ditambah dengan keterbatasan lahan dan tantangan demografis, keputusan kebijakan Bahrain selama dekade mendatang kemungkinan akan menentukan ketahanan sosial-ekonominya.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam dinamika diversifikasi ekonomi Bahrain dalam menghadapi era pasca-minyak. Pertanyaan utama yang diangkat adalah: faktor-faktor apa yang mendorong Bahrain mengurangi ketergantungannya pada minyak, dan sejauh mana kebijakan pemerintah efektif dalam memperkuat sektor non-migas serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis New Institutional Economics (NIE), studi ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pendorong utama diversifikasi ekonomi Bahrain, (2) mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor non-migas, dan (3) menilai dampak diversifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis terhadap literatur transformasi ekonomi di negara-negara Teluk serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi negara berpendapatan menengah dengan sumber daya terbatas.

Metode

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong Bahrain mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan beralih ke diversifikasi ekonomi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor non-minyak dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial negara. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui data

empiris, tanpa terkekang oleh keterbatasan analisis kuantitatif. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk menemukan pola diversifikasi ekonomi di Bahrain secara spontan, berdasarkan data yang diperoleh tanpa didahului oleh hipotesis prakonsepsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif yang mencakup berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi pemerintah Bahrain, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademis. Dokumen resmi pemerintah Bahrain, termasuk kebijakan ekonomi, laporan tahunan, dan rencana strategis terkait diversifikasi ekonomi, akan dianalisis untuk memahami langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Laporan dari lembaga internasional akan digunakan untuk mendapatkan perspektif eksternal mengenai transformasi ekonomi Bahrain.

Selain itu, publikasi akademis seperti artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas diversifikasi ekonomi di Bahrain dan negara-negara Teluk lainnya akan dikaji untuk mendapatkan wawasan teoretis dan empiris yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam diversifikasi ekonomi Bahrain. Analisis tematik melibatkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema yang berulang dalam data yang dikumpulkan. Analisis ini cocok untuk mengkaji konten manifes maupun laten, sehingga memungkinkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan nasional, tekanan ekonomi global, dan konstruksi identitas berinteraksi dalam membentuk strategi ekonomi Bahrain.

Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Bahrain memengaruhi pertumbuhan sektor non-migas dan dampaknya terhadap perekonomian serta stabilitas sosial negara. Dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan, para peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan diversifikasi ekonomi yang telah diterapkan. Penggunaan metode kualitatif dan tematik dibenarkan oleh sifat eksploratif dari penelitian ini. Transformasi ekonomi Bahrain tidak semata-mata didorong oleh faktor-faktor material, tetapi juga dibentuk oleh identitas, norma-norma global, dan tekanan geopolitik—dimensi-dimensi yang paling baik ditangkap melalui pendekatan interpretatif.

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam keuntungan dan kesulitan yang dihadapi Bahrain selama proses diversifikasi ekonominya, serta bagaimana hal ini berdampak pada kebijakan ekonomi negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik, mengungkap potensi sinergi yang belum dimanfaatkan, dan merancang strategi untuk mengatasi tantangan yang ada. Diharapkan hasil studi ini tidak hanya memberikan gambaran akurat tentang kondisi saat ini, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi Bahrain menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua dekade terakhir, menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi negara Teluk yang semula

bergantung pada minyak. Transformasi struktural ini menggambarkan kemampuan Bahrain untuk beradaptasi terhadap perubahan global melalui kebijakan ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis inovasi. Ketergantungan historis pada sektor minyak yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan negara kini secara bertahap beralih ke ekonomi yang lebih beragam dan berdaya tahan (Khalifa, 2015). Pemerintah Bahrain memprioritaskan empat sektor strategis keuangan, pariwisata, teknologi informasi, dan manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian baru

Transformasi ekonomi Bahrain menunjukkan keberhasilan diversifikasi, dengan kontribusi sektor non-minyak terhadap PDB meningkat drastis dari sekitar 50% (2000) menjadi lebih dari 80% (2023) (*PDB Bahrain, 2025*). Keberhasilan ini didorong oleh perkembangan pesat sektor keuangan, yang menjadikan Manama sebagai pusat keuangan regional dengan investasi besar-besaran di bidang pariwisata melalui proyek-proyek seperti Teluk Bahrain dan Formula; serta industrialisasi non-migas, terutama industri aluminium dan manufaktur. Sektor keuangan berkontribusi 16-18% terhadap PDB (2023), pariwisata sekitar 6%, dan industri non-migas 14%. Strategi ini menunjukkan komitmen Bahrain untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan yang tahan terhadap fluktuasi harga komoditas. Proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Keuangan Bahrain (BFH) telah mendorong pertumbuhan pesat sektor keuangan Bahrain, yang saat ini menyumbang 16-18% terhadap PDB pada tahun 2023 (*Elsayed et al., 2023*).

Sektor keuangan menjadi pilar utama dalam keberhasilan diversifikasi. Melalui inisiatif seperti Bahrain Financial Harbour (BFH) dan kebijakan kepemilikan asing penuh, Bahrain telah memposisikan dirinya sebagai pusat keuangan regional. Lebih dari 100 lembaga keuangan internasional kini beroperasi di Manama, termasuk perusahaan fintech seperti Rain dan Tarabut Gateway (*Naser et al., 2024*). Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan investasi infrastruktur yang kuat, tetapi juga bukti nyata reformasi regulasi yang menumbuhkan kepercayaan pasar dan memperkuat kerangka ekonomi berbasis inovasi. Dengan demikian, BFH bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen kebijakan kelembagaan yang mempercepat efisiensi ekonomi, sesuai dengan pandangan North tentang pentingnya institusi adaptif bagi pembangunan jangka panjang.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam diversifikasi ekonomi Bahrain dengan berkontribusi pada pertumbuhan sektor non-migas. Melalui Visi Ekonomi Bahrain 2030, pemerintah secara aktif mendorong pengembangan UKM yang kini menyumbang 30% PDB dan menyerap 45% tenaga kerja lokal (*Zayani et al., 2023*). Sektor-sektor seperti FinTech, e-commerce, dan industri kreatif berkembang pesat berkat inovasi dari UKM, seperti perusahaan rintisan Rain (kripto syariah) dan Tarabut Gateway (perbankan terbuka), yang memperkuat posisi Bahrain sebagai pusat keuangan digital. Selain itu, UKM mendukung ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan sektor manufaktur dan TIK yang stabil sebesar 3,3% per tahun (*Nakibullah, 2018*). Pemerintah mendukung UKM melalui kebijakan seperti Regulatory Sandbox untuk uji coba produk keuangan, pembiayaan syariah melalui Bank Pembangunan Bahrain (BDB), dan insentif kepemilikan asing 100%.

Tantangan seperti akses pendanaan dan persaingan regional diatasi melalui program pelatihan Tamkeen dan kolaborasi dengan industri-industri besar, seperti pasokan komponen untuk pabrik aluminium Alba. Dengan demikian, UKM tidak hanya melengkapi diversifikasi ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung transformasi Bahrain menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi Bahrain, tetapi juga membuka peluang bagi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Oudat, 2025). Upaya berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur mendukung transisi ekonomi ini. Bahrain menarik sebagai pusat keuangan dengan lebih dari 100 bank lepas pantai dan kantor perwakilan, termasuk 65 perusahaan AS. Lembaga keuangan internasional tertarik untuk beroperasi di Bahrain karena lingkungan bisnisnya yang baik, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur keuangan yang kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bahrain telah menerapkan reformasi perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengusulkan kerangka kerja perpajakan perusahaan yang bertujuan memperluas sumber pendapatan pemerintah di luar hidrokarbon (Bansal & Alfardan, 2020). Meskipun langkah-langkah ini memperkuat keberlanjutan fiskal, langkah-langkah ini juga berfungsi sebagai sinyal regulasi bagi investor tentang pergeseran Bahrain menuju ekonomi yang matang dan berbasis aturan. Meskipun awalnya menghadapi penolakan, penerapan PPN telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik akuntansi dan transparansi, menyelaraskan dengan standar ekonomi global, dan meningkatkan iklim usaha. Hal ini mencerminkan pergeseran kelembagaan yang lebih luas yang sejalan dengan tujuan Visi Ekonomi 2030. Sejalan dengan reformasi fiskal, pemerintah telah memprioritaskan investasi di bidang pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi untuk membangun tenaga kerja terampil bagi sektor-sektor yang sedang berkembang.

Institusi seperti Universitas Bahrain dan Politeknik Bahrain telah menyesuaikan kurikulum dengan disiplin ilmu yang relevan dengan pasar, khususnya di bidang teknologi informasi, logistik, dan jasa keuangan. Program vokasi, yang seringkali bermitra dengan industri swasta dan lembaga seperti Tamkeen, bertujuan untuk mengurangi pengangguran kaum muda dan memastikan kesiapan pasar tenaga kerja. Upaya-upaya ini merupakan bagian integral dari diversifikasi basis ekonomi Bahrain, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan mendukung sektor-sektor berbasis pengetahuan. Bersama-sama, kebijakan fiskal dan pengembangan sumber daya manusia berperan sebagai pendorong yang saling melengkapi, memperkuat transformasi struktural Bahrain menuju ketahanan ekonomi jangka panjang.

Tantangan yang dihadapi

Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dalam diversifikasi ekonomi, Bahrain masih menghadapi tantangan struktural. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak, meskipun telah menurun, tetap menjadi faktor risiko dengan kontribusi sebesar 20% terhadap PDB dan 70% pendapatan pemerintah berasal dari minyak. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal di sektor non-minyak juga krusial bagi pertumbuhan inklusif (Babu et al., 2025). Terakhir, persaingan ekonomi regional membutuhkan strategi yang adaptif dan kompetitif. Hal ini membuat perekonomian rentan terhadap volatilitas harga minyak global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 atau

konflik geopolitik. Di sisi lain, persaingan regional dari Dubai (UEA) dan Riyadh (Arab Saudi) di sektor keuangan dan pariwisata semakin ketat. Dubai telah menjadi pusat keuangan global, sementara Saudi sedang mengembangkan Visi 2030 dengan investasi besar-besaran di bidang hiburan dan pariwisata, seperti NEOM dan Proyek Laut Merah ([Štreimikienė et al., 2020](#)).

Namun, Bahrain menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Dubai International Financial Centre (DIFC) di Dubai dan megaprojek keuangan dan hiburan yang sedang berkembang di Arab Saudi, termasuk Vision 2030 dan Qiddiya ([Alasiri & Mohammed, 2022](#)). Sementara Bahrain Financial Harbour (BFH) memberikan keunggulan biaya yang kompetitif seperti biaya operasional dan regulasi yang lebih rendah dibandingkan dengan DIFC, skala fisiknya yang terbatas dan pengenalan merek global yang relatif sederhana menghadirkan batasan substansial dalam menarik lembaga keuangan internasional papan atas. Untuk mengatasi kendala ini, Bahrain telah berupaya memanfaatkan kekuatan ceruknya dalam keuangan Islam dan teknologi keuangan meskipun ada kemajuan dalam diversifikasi ekonomi, Bahrain terus menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan yang beragam. Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kerangka kerja pajak perusahaan yang diantisipasi, meskipun penting untuk stabilitas fiskal, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan UKM mengenai beban kepatuhan dan struktur biaya.

Banyak perusahaan kecil kesulitan beradaptasi dengan sistem akuntansi formal dan pelaporan regulasi, yang dapat menghambat daya saing mereka. Meskipun instrumen fiskal ini meningkatkan transparansi dan menyelaraskan Bahrain dengan standar internasional, efektivitasnya bergantung pada mekanisme dukungan pelengkap untuk pengembangan kapasitas Perusahaan ([Pu et al., 2023](#)). Selain itu, pasar tenaga kerja nasional terus menunjukkan ketidaksesuaian keterampilan, terutama di sektor-sektor seperti keuangan digital, logistik, dan teknologi informasi. Meskipun perguruan tinggi telah mulai menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar, laju integrasinya masih belum merata. Inisiatif pelatihan vokasional menjanjikan, tetapi seringkali terbatas skalanya atau terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengembangan tenaga kerja regional.

Ketergantungan Bahrain yang tinggi pada tenaga kerja asing semakin mempersulit strategi diversifikasinya, menciptakan ketegangan sosial-ekonomi dan membatasi peluang penyerapan tenaga kerja lokal ([Jolo et al., 2022](#)). Di saat yang sama, dinamika geopolitik di kawasan Teluk, terutama persaingan dari UEA dan Arab Saudi, menuntut inovasi dan kelincahan yang cepat. Luas daratan Bahrain yang terbatas dan kerentanan lingkungan, terutama terkait kelangkaan air dan kepadatan perkotaan, semakin mempersulit ekspansi berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya implementasi kebijakan yang kohesif yang menyeimbangkan ambisi reformasi dengan kemampuan adaptasi sosial dan kelembagaan. Namun demikian, keterbatasan lahan dan keterbatasan demografi negara ini menuntut inovasi lebih lanjut, terutama dalam perencanaan perkotaan, optimalisasi infrastruktur, dan layanan keuangan digital ([Das, 2024](#)).

Tanpa fleksibilitas kebijakan yang berkelanjutan dan posisi regional yang strategis, Bahrain berisiko tertinggal dari negara-negara Teluk yang lebih besar dengan

portofolio yang lebih beragam dan agenda pembangunan yang agresif. Oleh karena itu, kemampuan Bahrain untuk mempertahankan daya saing bergantung pada seberapa efektif negara ini memanfaatkan keunggulan komparatifnya di sektor-sektor khusus dan kelincahannya dalam adaptasi regulasi. Selain itu, keterbatasan geografis Bahrain yang hanya seluas 786,5 km² menghambat perluasan infrastruktur dan ketahanan sumber daya alam, termasuk air dan lahan subur ([González-Rodríguez et al., 2023](#)).

Hal ini memaksa Bahrain untuk bergantung pada impor dan inovasi teknologi guna mengoptimalkan sumber dayanya yang terbatas. Solusi potensial meliputi percepatan transisi energi hijau dan penguatan kolaborasi regional untuk meningkatkan daya saing. Namun, dengan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dan perencanaan strategis yang tepat, Bahrain berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas sosial jangka Panjang ([Aldada et al., 2024](#)). Keberhasilan ini bergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar global.

Langkah-langkah yang diimplementasikan

Menanggapi tekanan fiskal dan prioritas pembangunan yang terus berkembang, pemerintah Bahrain telah mengadopsi langkah-langkah kebijakan komprehensif untuk mendukung diversifikasi dan mengatasi kendala sistemik ([Matallah, 2020](#)). Implementasi PPN dan kerangka kerja pajak perusahaan potensial telah disertai dengan program pelatihan dan dukungan infrastruktur digital, khususnya bagi UKM, melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga seperti Tamkeen dan Kamar Dagang Bahrain. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi hambatan kepatuhan dan memastikan bahwa reformasi fiskal tidak membebani usaha kecil secara tidak proporsional, yang penting bagi ketahanan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi pusat agenda diversifikasi pemerintah. Reformasi pendidikan telah berfokus pada penyelarasan kurikulum universitas dengan tuntutan pasar tenaga kerja, khususnya di bidang keuangan, TIK, dan logistik.

Politeknik Bahrain, misalnya, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan industri untuk menyediakan modul pembelajaran terapan, sementara program vokasi yang didanai oleh Tamkeen dan Kementerian Tenaga Kerja telah diperluas untuk mencakup sertifikasi literasi digital, pengodean, dan teknologi finansial. Program-program ini dirancang untuk mengurangi pengangguran kaum muda, membekali penduduk lokal dengan keterampilan yang relevan dengan pasar, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja ekspatriat. Lebih lanjut, Bahrain terus memperkuat transparansi regulasi dan insentif investor, menawarkan kepemilikan asing penuh di sektor-sektor utama dan menyederhanakan proses pendaftaran bisnis. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Bahrain sebagai pusat regional tetapi juga memastikan bahwa diversifikasi tertanam dalam kerangka kelembagaan yang kuat. Fokus gabungan pada keseimbangan fiskal, pendidikan, dan reformasi regulasi menandakan pendekatan holistik menuju transformasi ekonomi jangka panjang. Kebijakan yang diterapkan Bahrain dalam konteks transisi ekonomi menuju diversifikasi sektoral mendorong transisi ekonomi tersebut.

Visi Ekonomi Bahrain 2030 (*Bahrain Economic, 2025*) menekankan pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan keberlanjutan sebagai pilar utama transformasi ekonominya. Inisiatif ini bertujuan mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, terutama di bidang ilmu terapan, guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Selain itu, Visi 2030 mendorong kewirausahaan dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan sektor swasta yang dinamis. Dalam upaya menarik investasi asing langsung (FDI), pemerintah Bahrain menawarkan berbagai insentif, termasuk penyediaan lahan industri dengan harga sewa rendah dan pembebasan bea masuk untuk sektor dan zona ekonomi tertentu (*Bahrain Free Zone Company Formation, 2025*). Meskipun Bahrain tidak memiliki zona perdagangan bebas tradisional, negara ini memiliki kawasan ekonomi khusus yang memberikan insentif strategis seperti pembebasan pajak dan kepemilikan asing penuh. menjadikannya tujuan yang menarik bagi bisnis yang ingin mengurangi biaya dan mengakses pasar regional.

Pendekatan ini berbeda dari yurisdiksi GCC lainnya, karena banyak aktivitas komersial di Bahrain tidak tunduk pada pembatasan kepemilikan, sehingga memungkinkan bisnis di dalam negeri untuk beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar (*Alghemary et al., 2023*). Melalui kombinasi pengembangan sumber daya manusia, promosi inovasi, dan insentif investasi yang kompetitif, Bahrain berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis regional. Sejalan dengan Visi Ekonomi Bahrain 2030, pengembangan Bahrain Financial Harbour (BFH) merupakan salah satu implementasi kebijakan paling ambisius dan nyata di negara tersebut yang bertujuan untuk diversifikasi ekonomi. Berlokasi strategis di Manama, BFH diproyeksikan sebagai pusat keuangan yang menawarkan infrastruktur canggih, biaya operasional yang kompetitif, dan lingkungan regulasi yang ramah bisnis untuk menarik lembaga keuangan regional dan internasional (*Shehab & Hamdan, 2021*).

Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mendorong sektor jasa bernilai tinggi, khususnya keuangan Islam, perbankan investasi, manajemen aset, dan teknologi finansial (fintech). BFH juga didukung oleh perangkat kebijakan seperti tunjangan kepemilikan asing penuh, ruang uji coba regulasi untuk eksperimen fintech, dan kemitraan dengan jaringan modal ventura untuk mendorong inovasi (*Wadi, 2022*). Selain itu, integrasi BFH ke dalam program kewirausahaan nasional dan skema dukungan UKM meningkatkan perannya tidak hanya sebagai pusat keuangan, tetapi juga sebagai pendorong lapangan kerja dan pertumbuhan sektor swasta. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari pusat-pusat keuangan yang lebih besar seperti DIFC Dubai, Bahrain memanfaatkan kelincahan dan posisinya yang khusus dalam keuangan Islam untuk mempertahankan relevansi dan daya saing dalam lanskap keuangan Teluk yang terus berkembang (*AbdulGaniyy et al., 2021*).

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi Bahrain dari ekonomi yang bergantung pada minyak menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi sebagian besar didorong oleh reformasi kelembagaan dan inovasi kebijakan strategis. Dengan memanfaatkan instrumen seperti Visi Ekonomi Bahrain 2030, kotak pasir regulasi, keuangan Islam, dan inisiatif pemberdayaan UKM, negara ini telah berhasil

meningkatkan pangsa sektor non-migas hingga lebih dari 80% dari PDB-nya. Sektor-sektor ini telah memperkuat ketahanan makroekonomi dan meletakkan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan struktural yang terus berlanjut, seperti ketergantungan pada tenaga kerja asing, keterbatasan lahan, dan persaingan regional yang semakin ketat, terus menghambat pertumbuhan.

Secara teoritis, penerapan Ekonomi Kelembagaan Baru memberikan perspektif yang bermanfaat untuk memahami bagaimana kualitas kelembagaan, ketergantungan jalur, dan biaya transaksi membentuk efektivitas kebijakan dalam ekonomi rente. Secara praktis, pengalaman Bahrain menawarkan pelajaran yang relevan bagi negara-negara lain yang mengalami keterbatasan sumber daya dan sedang menjalani transisi ekonomi. Ke depannya, pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi regulasi, insentif investasi yang terarah, dan pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting. Penekanan juga harus diberikan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kolaborasi swasta-publik, dan pendalaman keselarasan antara pendidikan dan tuntutan pasar tenaga kerja. Kasus Bahrain menggarisbawahi peran penting lembaga adaptif dalam mendorong ketahanan ekonomi pasca-minyak di Teluk dan sekitarnya.

Referensi

- AbdulGaniyy, A., AbdulKareem, I. A., & AbdulRaheem, A. (2021). Financing Entrepreneurship in Post-Covid-19 Era: The Islamic Banking and Finance Option. *Journal of Islamic Economic and Business Research*. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.23>
- Alasiri, A., & Mohammed, V. (2022). Healthcare Transformation in Saudi Arabia: An Overview Since the Launch of Vision 2030. *Health Services Insights*, 15. <https://doi.org/10.1177/11786329221121214>
- Aldada, A., Alrasheed, R., & Khalifa, M. (2024). Sustainable Development in Bahrain: Analysis of Industry Sectors, the Economy, Sustainable Communities, the Environment and the Quality of Government Institutions. *2024 ASU International Conference in Emerging Technologies for Sustainability and Intelligent Systems (ICETSYS)*, 2007–2013. <https://doi.org/10.1109/icetsis61505.2024.10459692>
- Alghemary, M., Al-Najjar, B., & Polovina, N. (2023). What do we know about real earnings management in the GCC? *Journal of Accounting in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/jaee-06-2023-0180>
- Aljenaïd, S., Kadhem, G., Alkhuzaei, M., & Alam, J. (2022). Detecting and Assessing the Spatio-Temporal Land Use Land Cover Changes of Bahrain Island During 1986–2020 Using Remote Sensing and GIS. *Earth Systems and Environment*, 6, 787–802. <https://doi.org/10.1007/s41748-022-00315-z>
- AlShehabi, O., & Suroor, S. (2016). Unpacking “Accumulation By Dispossession”, “Fictitious Commodification”, and “Fictitious Capital Formation”: Tracing the Dynamics of Bahrain’s Land Reclamation. *Antipode*, 48, 835–856. <https://doi.org/10.1111/anti.12222>
- Babu, M., Taqi, M., & Salari, E. (2025). Economic stability in the GCC countries: A comparative study of the Kingdom of Bahrain and Sultanate of Oman. *Edelweiss Applied Science and Technology*. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i1.4250>

- Bahrain Economic 2030. (2025). Movne.Gov.
<https://www.bahrain.bh/wps/portal/en/BNP/BahrainAtAGlance/Bahrain2030>
- Bahrain Free Zone Company Formation. (2025). Commitbiz.
<https://www.commitbiz.com/bh/bahrain-free-trade-zone>
- Bansal, A., & Alfardan, A. A. A. A. (2020). ROLE OF VALUE ADDED TAX IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF KINGDOM OF BAHRAIN. *Journal of Critical Reviews*.
<https://doi.org/10.31838/jcr.07.03.03>
- Chen, J., Huang, S., & Ajaz, T. (2022). Natural resources management and technological innovation under EKC framework: A glimmer of hope for sustainable environment in newly industrialized countries. *Resources Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103016>
- Das, D. K. (2024). Exploring the Symbiotic Relationship between Digital Transformation, Infrastructure, Service Delivery, and Governance for Smart Sustainable Cities. *Smart Cities*. <https://doi.org/10.3390/smartcities7020034>
- Elsayed, A., Naifar, N., Uddin, G., & Wang, G. (2023). Multilayer information spillover networks between oil shocks and banking sectors: Evidence from oil-rich countries. *International Review of Financial Analysis*.
<https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102602>
- González-Rodríguez, M., Díaz-Fernández, M., & Pulido-Pavón, N. (2023). Tourist destination competitiveness: An international approach through the travel and tourism competitiveness index. *Tourism Management Perspectives*.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101127>
- Harding, T., Stefanski, R., & Toews, G. (2020). Boom Goes the Price: Giant Resource Discoveries and Real Exchange Rate Appreciation. *The Economic Journal*.
<https://doi.org/10.1093/ej/ueaa016>
- Jolo, A., Ari, I., & Koç, M. (2022). Driving Factors of Economic Diversification in Resource-Rich Countries via Panel Data Evidence. *Sustainability*.
<https://doi.org/10.3390/su14052797>
- Jones, M. (2020). Political Repression in Bahrain. <https://doi.org/10.1017/9781108558822>
- Khalifa, F. (2015). *Urban Sustainability and Transforming Culture in the Arabian Gulf: The Case of Bahrain*. <https://consensus.app/papers/urban-sustainability-and-transforming-culture-in-the-khalifa/2052c4a55f4e544e86f03528b0a149bc/>
- Matallah, S. (2020). Economic diversification in MENA oil exporters: Understanding the role of governance. *Resources Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101602>
- Mukoyama, N. (2023). Colonial Oil and State-Making: The Separate Independence of Qatar and Bahrain. *Comparative Politics*.
<https://doi.org/10.5129/001041523x16801041950603>
- Nakibullah, A. (2018). Economic Diversification in Bahrain. *Applied Economics and Finance*. <https://doi.org/10.11114/aef.v5i5.3576>
- Naser, H., Sultanova, G., & Nahar, S. (2024). The Impact of Fintech Innovation on Bank's Performance: Evidence from the Kingdom of Bahrain. *International Journal of*

- Economics and Financial Issues*. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15512>
- Nassar, A. (2024). Strategic energy transition in the Gulf Cooperation Council: Balancing economic, social, political, and environmental dynamics for sustainable development. *International Journal of Green Energy*, 22, 1570–1586. <https://doi.org/10.1080/15435075.2024.2435434>
- Oudat, M. (2025). An Investigation on Financial Development, Trade Openness and Economic Growth: Var Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5147086>
- PDB Bahrain. (2025). Trading Economics. <https://id.tradingeconomics.com/bahrain/gdp>
- Pu, X., Zeng, M., & Zhang, W. (2023). Corporate sustainable development driven by high-quality innovation: Does fiscal decentralization really matter? *Economic Analysis and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.008>
- Rahman, A., & Zayed, N. (2021). *IMPACT OF LEVERAGE RATIOS ON INDICATORS OF FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM BAHRAIN*. <https://consensus.app/papers/impact-of-leverage-ratios-on-indicators-of-financial-rahman-zayed/b5cb0064fee65600a3829b4eea3dac26/>
- Shهاب, N., & Hamdan, A. (2021). Artificial Intelligence and Women Empowerment in Bahrain. *Applications of Artificial Intelligence in Business, Education and Healthcare*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72080-3_6
- Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2020). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. *Sustainable Development*, 29, 259–271. <https://doi.org/10.1002/sd.2133>
- Wadi, R. M. A. (2022). The Impact of Fintech Phenomenon on Economic Development: The Case of Bahrain. *Artificial Intelligence for Sustainable Finance and Sustainable Technology*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93464-4_14
- Zayani, M. Al, Baher, M., Beeshi, S. Al, Ajmi, H. Al, & Alaghbari, M. (2023). The Reality of SMEs and Sustainable Development from the Perspective of Innovative Economic Vision of the Kingdom of Bahrain 2030. *International Journal of Technology, Innovation and Management (IJTIM)*. <https://doi.org/10.54489/ijtim.v3i1.194>